

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan kompleksnya kebutuhan global terhadap keberlanjutan lingkungan pada sektor bisnis. Orientasi penilaian kinerja sebuah perusahaan sudah tidak lagi hanya seputar profitabilitas. Ada perhatian lebih bagi para pemangku kepentingan dalam menilai pemenuhan tanggung jawab perusahaan yaitu terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi strategi keberlanjutan bisnis bagi organisasi atau perusahaan. Berdasarkan pernyataan Elkington (2004) dalam Luk-luk Fuadah (2018) dikatakan jika perusahaan perlu menyiapkan tiga garis bawah yang terpisah. Dimana garis bawah pertama merupakan laba yang menyatakan profit atau rugi. Di garis kedua terdapat orang (*people*) yang dicerminkan dalam tanggung jawab perusahaan terhadap sosial. Sementara pada garis bawah ketiga adalah planet yang dicerminkan perusahaan melalui tanggung jawab atas lingkungan.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan, karena itu perusahaan tidak bisa beroperasi berdasarkan keinginan sendiri melainkan perlu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan informasi bagi banyak pihak (Ulum, 2017). Dilansir dari www.liputan6.com (Dipublikasikan pada 27 Juli 2021) berdasarkan

pernyataan dari direktur pengembangan BEI tercatat peningkatan besar dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Setidaknya laporan keberlanjutan yang diungkapkan pada 2020 hanya terdapat 54 perusahaan. Sementara pada tahun 2021 melonjak menjadi 135 perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang kewajiban pelaksanaan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat terjadi peningkatan investasi keberlanjutan selama tahun 2020-2021. Adapun investasi keberlanjutan tersebut dilakukan pada perusahaan dengan praktik tanggungjawab sosial dan lingkungan serta pengungkapan laporan keberlanjutan yang baik. Tercatat jika akhir tahun 2020 terdapat dana kelolaan Asset Under Management (AUM) mencapai Rp 3.06 triliun dan pada semester 1 2021 total dana kelolaan telah mencapai Rp 2.54 Triliun. Berdasarkan data tersebut menyatakan jika investasi keberlanjutan pada perusahaan dengan praktik keberlanjutan mengalami peningkatan besar. Tidak hanya emiten besar, penerapan laporan keberlanjutan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2023 laporan keberlanjutan juga akan dijalankan pada emiten aset sedang dengan aset 50-250 miliar. Dan pada 2025 untuk emiten-emiten kecil. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan menjadi sebuah *mandatory* yang berhubungan dengan tingkat investasi juga penilaian perusahaan.

Manfaat dapat diberikan melalui pengungkapan informasi yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan *Stakeholder*. Karena itu pengungkapan informasi merupakan interaksi antara organisasi atau perusahaan dalam memperoleh dukungan dari *Stakeholder*. Menurut Rizqy (2021), keberlangsungan bisnis bergantung pada dukungan dari *Stakeholder*.

Sebab dorongan dari *Stakeholder* menjadi penting dalam keberlanjutan perusahaan. Maka sebuah perusahaan sebaiknya mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat (Ulum, 2017). Sebagai wadah dalam menciptakan nilai perusahaan dalam memperoleh dukungan *stakeholder* terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan diwajibkan menerbitkan laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* (SR). Laporan keberlanjutan menurut GRI G4 dalam Aswani & Swami (2017) merupakan proses yang membantu perusahaan dalam menentukan tujuan, mengukur kinerja, dan pengelolaan perubahan ke arah keberlanjutan ekonomi global. Yang mana laporan ini menggabungkan aspek profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability reporting* didorong oleh motivasi internal juga eksternal (Lozano, Nummert, & Ceulemans, 2016). Pengungkapan *sustainability reporting* mendorong keberlanjutan perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan strategi, perubahan organisasi, reputasi, validasi, *stakeholder*, dan laporan keberlanjutan selanjutnya. Kewajiban

pengungkapan *sustainability reporting* didukung oleh beberapa aturan pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang kewajiban sosial, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, juga Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dikatakan pada pasal 10 ayat 1 Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 jika Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan.

Menurut Arasa & Crowther (2007) dalam Luk-luk Fuadah (2018) setidaknya ada empat aspek keberlanjutan yang dapat diakui dan dianalisis perusahaan dalam *sustainability reporting* (SR), yaitu: 1) Pengaruh kemasyarakatan, yang berkaitan dengan dampak masyarakat terhadap perusahaan pada kontrak sosial juga pemangku kepentingan; 2) Dampak lingkungan, yang didefinisikan atas dampak kegiatan perusahaan pada lingkungan geofisiknya; 3) Budaya organisasi, berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan *stakeholder* internal seperti karyawan; 4) Keuangan, dijelaskan sebagai pengembalian atas risiko yang dilakukan. Keempat aspek tersebut menjadi kunci keberlanjutan perusahaan. Terutama terkait dengan keberlanjutan perusahaan atas tingginya kebutuhan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan saat ini.

Dari keempat aspek kunci keberlanjutan yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu diantaranya yaitu aspek dampak lingkungan. Berkaitan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability*

Reporting) masyarakat berharap jika proses bisnis perusahaan akan tetap menjaga tatanan lingkungan untuk keberlanjutan dimasa depan. Salah satu industri yang melakukan eksploitasi sumber daya alam dalam proses bisnisnya adalah industri manufaktur. Menurut Tamrin & Maddatuang (2019) industri manufaktur identik dengan pengolahan barang baku menjadi barang jadi. Pada proses bisnisnya, industri manufaktur mengalami siklus penuh dari *input* bahan mentah hingga *output* menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Selama siklus produksi tersebut terpenuhi perusahaan manufaktur menghasilkan limbah yang mungkin dapat mengganggu tatanan lingkungan. Dilansir dari <https://sumut.idntimes.com/> (dipublikasikan pada 14 Maret 2022) bahwa pada tahun 2021 setidaknya dari 60 juta ton limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) banyak dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Salah satu kasus nyatanya adalah pelaporan pencemaran akibat limbah dari perusahaan produsen sarung PT Panggung Jaya Indah Textile di Pekalongan. Keresahan warga meningkat akibat dari limbah perusahaan berupa asap dan debu batu bara yang mengancam kesehatan.

Maka dari itu dalam Luk-luk Fuadah (2018) perusahaan manufaktur diharapkan melakukan beragam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti perlindungan lingkungan, manajemen karyawan, manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab, donasi amal, manfaat pelanggan, pengembangan masyarakat, iklim keselamatan kerja, dan mitigasi risiko produk (Speier et.al., 2011; Skouloudis et.al., 2015). Dari pernyataan tersebut terlihat jika industri manufaktur juga memiliki

kebutuhan akan kewajiban sosial yang dapat diungkapkan dalam *sustainability reporting*.

Menurut OECD (2004) *Good Corporate governance* adalah sebuah set yang mengatur keterkaitan diantara organisasi atau perusahaan, pemegang saham, dan *Stakeholder* (Edo, 2014). Tata kelola yang baik membantu terlaksananya akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk terkait tanggung jawab sosial. Akhmad Syakhroza (2005) dalam Prasetia & Ghozali (2017) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sebuah paket tata kelola yang mengelola sumber daya secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil. Dengan kata lain, prinsip pada penerapan *Good Corporate governance* yakni *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dapat membantu meningkatnya pelayanan pada *Stakeholder* dan juga menambah dukungan dari *Stakeholder* itu sendiri. Terkait *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*, ketiga prinsip dasar *Good Corporate governance* ini berkaitan dengan pelaksanaan pengungkapan *Sustainability Reporting* (SR).

Menurut Rochmaniah & Sinduwiatmo (2020), *responsibility* atau pertanggungjawaban mengacu pada kepatuhan organisasi atau perusahaan pada peraturan yang berlaku, dimana di dalamnya termasuk akan perlindungan lingkungan sekitar perusahaan. Dengan pemenuhan tanggung jawab ini, perusahaan telah mementingkan kepentingan dari *Stakeholder*

sebagai bentuk konsekuensi dari kegiatan operasi perusahaan. Sementara akuntabilitas dan transparansi merupakan penjaminan perusahaan dengan keterbukaan informasi perusahaan yang tidak hanya menyangkut aspek keuangan namun juga termasuk aspek non keuangan seperti pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*).

KNKG (2021) mengkategorikan bagian perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan komisaris, dan Direksi, ketiganya berperan penting dalam mewujudkan GCG secara efektif. Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab dalam melindungi kepentingan pemangku kepentingan serta mempertanggungjawabkannya di dalam RUPS. Berkaitan dengan itu, salah satu dari lima fungsi utama yang disebutkan Eko Sudarmanto, dkk (2021) adalah melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pradani & Lestari (2022) menyatakan jika dewan direksi menjadi faktor pendorong dalam penyertaan isu keberlanjutan perusahaan. Baik itu dewan direksi atau dewan komisaris, fungsi pengawas dan manajemen dari keduanya mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*). Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan pemberi nasihat bagi dewan direksi saat menjalankan perusahaan, ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh cukup kuat dalam memberikan saran kepada dewan direksi untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*). Fungsinya yang juga menjadi wakil dari principal dalam perusahaan dan

sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi membuat dewan komisaris memiliki pengaruh bagi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial (Sukasih dan Sugiyanto, 2017).

Dalam dewan komisaris dan direksi terdapat berbagai keberagaman latar belakang yang dapat mempengaruhi keputusan penyertaan isu keberlanjutan serta pengungkapannya. Seperti partisipasi wanita dalam jajaran dewan. Wanita memiliki lebih banyak keterlibatan *corporate philanthropy* dan berperan dalam kegiatan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kepentingan *Stakeholder* (Lin et al, 2018). Selain itu keberagaman lainnya yang juga berpengaruh dalam pengungkapan laporan keberlanjutan adalah latar belakang pendidikan dewan. Semakin tinggi pemahaman dewan terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis, maka semakin baik pula pengelolaan perusahaan. Apabila pemahaman terhadap keberlanjutan juga tinggi maka dewan akan lebih memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Latar belakang edukasi dewan, memegang peran dalam mengembangkan inovasi dan mengambil keputusan yang lebih baik (Kagzi and Guha, 2018).

Jadi dapat disimpulkan jika dalam praktiknya, organisasi atau perusahaan tidak berjalan untuk kepentingan pribadi. Melainkan terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pemenuhan tanggung jawab organisasi atau perusahaan merupakan bentuk interaksi dan hubungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Hak yang penting bagi pemangku kepentingan adalah kebutuhan informasi. Dalam masa kini,

kebutuhan informasi telah berubah tidak hanya seputar keuangan melainkan mengenai lingkungan dan sosial dari perusahaan. Kepuasan dari masyarakat dan *Stakeholder* menjadi syarat keberlangsungan sebuah usaha. Oleh karena itu pemenuhan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi jalan bagi perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Pemenuhan kewajiban sosial dan lingkungan ini perusahaan wujudkan dalam sebuah laporan akuntabel yang disebut Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*). Dalam perusahaan sendiri, pelaksanaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan bisa dipengaruhi oleh keputusan dari dewan baik itu dewan direksi maupun dewan komisaris. Dewan direksi dan komisaris memiliki peranan dan latar belakang yang dapat mempengaruhi hasil pengambilan keputusan, termasuk terkait pelaksanaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut.

Dari penelitian sebelumnya, inkonsistensi terlihat dalam penelitian pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Ukuran dewan komisaris dianggap menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi manajemen dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian (Alfani & Muslih, 2022; Yanti et.al., 2021; Ellba et.al., 2022; Tyasaraja & Setiawati, 2023) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara besarnya dewan komisaris dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Secara kontradiksi, penelitian lainnya seperti (Salsabilla et.al., 2022; Dewanti & Afif, 2022; Afifah & Imanuella, 2021; Fauziah &

Asyik, 2019; Antoni & Pratami, 2022) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sementara beberapa pengujian keberagaman dewan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Keberagaman dewan sendiri banyak indikatornya, namun beberapa yang cukup sering dibahas adalah keberagaman gender dan keberagaman latar belakang pendidikan. Temuan dari penelitian sebelumnya oleh Setiawan et. al., (2018), Aman et. al (2021), Chebbi et. al (2020), Indriyani dan Sudaryanti (2020) menunjukkan pengaruh positif signifikan partisipasi wanita terhadap penyusunan laporan keberlanjutan. Namun, terdapat kontradiksi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradani dan Lestari (2022), Bangun & Ridaryanto (2021), Febriyanti (2021) yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan keberadaan Wanita di jajaran direksi terhadap kualitas *Sustainability reporting*.

Adapun inkonsistensi serupa ditemukan pada penelitian pengaruh keberagaman latar belakang pendidikan terhadap laporan keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Hadya dan Susanto (2018), Juwita & Honggowati, (2022), Umokoro et. al (2019), Selven et. al (2021) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara pendidikan dewan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Dan secara kontras beberapa penelitian lainnya seperti Gold et. al (2021), Bangun & Ridaryanto (2021), Amaliyah dan Solikhah (2019) menunjukkan hasil yang tidak

berpengaruh antara pendidikan dewan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan penjabaran dari beberapa temuan penelitian terdahulu sebelumnya, peneliti menemukan adanya gap penelitian pada pengaruh *size of commissioner board*, *board gender diversity* dan *education background of board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*. Hal ini disebabkan oleh adanya inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu terkait keberagaman dewan tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Size of commissioner board, Board gender diversity dan Education background of board Terhadap Pengungkapan Sustainability reporting”***.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti pengaruh *board gender diversity* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*). Dalam penelitian terdahulu tersebut, ukuran dewan komisaris yang dianggap berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*) juga telah diteliti dan terdapat kontradiksi sebagai hasilnya. Sebagian hasil penelitian menunjukkan jika terdapat pengaruh positif dimana besarnya ukuran dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara sebagian penelitian lainnya menunjukkan adanya pertentangan dimana tidak adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berkaitan dengan keberagaman dewan, peneliti menemukan adanya pengaruh positif signifikan keberagaman gender dalam dewan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun beberapa penelitian diantaranya, terdapat pula peneliti yang menunjukkan hasil uji jika keberagaman gender dalam dewan tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain mengenai keberagaman gender dalam dewan terdapat pula sebagian penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh *education background of board* pada pengungkapan *Sustainability reporting*. Dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa peneliti yang menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan diantara pengaruh latar belakang pendidikan pada dewan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, beberapa peneliti diantaranya juga menyimpulkan hasil uji bahwa tidak adanya dampak yang signifikan antara latar belakang pendidikan pada dewan terhadap diungkapkannya laporan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil tersebut terlihat adanya kontradiksi atau inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait pengaruh *size of commissioner board*, *board gender diversity*, dan *education background of board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting* sebagai berikut:

1. Apakah *size of commissioner board* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*?

2. Apakah *board gender diversity* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*?
3. Apakah *education background of board* berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebelumnya, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini ke dalam poin berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *size of commissioner board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *board gender diversity* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *education background of board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengkonfirmasi ulang atas penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengaruh *size of commissioner board*, *board gender diversity* dan *education background of board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.
- b. Menambah bukti atas gap pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *size of commissioner board*, *board gender*

diversity dan *education background of board* terhadap pengungkapan *Sustainability reporting*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi manajemen terkait dampak ukuran dewan komisaris terhadap praktik *Sustainability Reporting* dan pengungkapan *Sustainability Reporting*.
- b. Memberikan informasi bagi manajemen terkait dampak keberadaan wanita pada jajaran dewan terhadap praktik *Sustainability Reporting* dan pengungkapan *Sustainability Reporting*.
- c. Memberikan informasi bagi manajemen terkait pengaruh latar belakang pendidikan jajaran dewan bagi praktik *Sustainability Reporting* dan pengungkapan *Sustainability Reporting*.

